

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 05/PW.01-KPT/5317/KPU-KAB/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU SUMBA TENGAH**

**2022**

**KEPUTUSAN KPU KAB.SUMBA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2022, 5 HLM**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 05/PW.01-KPT/5317/KPU-KAB/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU SUMBA TENGAH**

**ABSTRAK** : - bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dibentuk Pelaksana Satuan Tugas Pengendalian Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumba Tengah; bahwa adanya perubahan Struktur Keanggotaan Pelaksana Satuan Tugas Pengendalian Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumba Tengah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumba Tengah Nomor 05/PW.01-Kpt/5317/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Pelaksana Satuan Tugas Pengendalian Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumba Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Pembentukan Pelaksana Satuan Tugas Pengendalian Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumba Tengah;

**Dasar Hukum :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aperatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Peagawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provins, dan Komisi Pemilihaa1 Umum Kabupaten/Kota;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur Tentang: Pembentukan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2022.  
- Lampiran 2 halaman.